

Analisis Kemiskinan Makro Kota Yogyakarta

2022



Analisis Kemiskinan Makro Kota Yogyakarta

2022



ANALISIS KEMISKINAN MAKRO KOTA YOGYAKARTA 2022

ISSN :
Nomor Publikasi :
Katalog : 3 2 0 5 0 2 2 . 3 4 7 1
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 75 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Gambar Kulit dan Tata Letak:

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Dicetak Oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab:

Mainil Asni

Editor:

Chandra Wahyu Yuniar

Penulis:

Hentiek Puspitawati

Pengolah Data:

Betik Endaryati

Gambar Kulit:

Avista Rahmadhani

Tata Letak:

Hentiek Puspitawati

Infografis:

Avista Rahmadhani

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional sehingga masih menjadi perhatian banyak pihak. Untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan maka diperlukan sejumlah indikator yang menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin di Indonesia. Indikator-indikator tersebut antara lain jumlah dan persentase penduduk miskin serta berbagai karakteristik kemiskinan lainnya.

Publikasi “**Analisis Kemiskinan Makro Kota Yogyakarta 2022**” menyajikan metodologi, penghitungan, dan analisis yang terkait dengan angka kemiskinan dan ketimpangan di Kota Yogyakarta tahun 2022. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 baik dari Susenas KOR maupun Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Selain itu, dilengkapi juga oleh indikator serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar dapat dibandingkan perubahan angkanya sehingga lebih menggambarkan perubahan riil lapangan.

Publikasi ini dapat terealisasi karena kerja sama berbagai pihak mulai dari petugas pengumpul data di lapangan sampai kepada tim analisis. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi diucapkan penghargaan tinggi dan terima kasih yang tulus.

Yogyakarta, September 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta

MAINIL ASNI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	5
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II KONDISI KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA	7
2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2012-2022	9
2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), 2011-2021	16
2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2011-2021	17
2.4 Tingkat Kemiskinan dan Persentase Total Pengeluaran Menurut Status Kemiskinan, 2022	19
BAB III KETIMPANGAN PENGELUARAN DI KOTA YOGYAKARTA	21
3.1 Gini Ratio	23
3.2 Indeks Theil dan Indeks L	24
3.3 Kriteria Bank Dunia	25
BAB IV PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA	27
4.1 Karakteristik Sosial Demografi	29
4.2 Karakteristik Pendidikan	30
4.3 Karakteristik Ketenagakerjaan	33
4.4 Karakteristik Tempat Tinggal	35
BAB V PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	41
5.1 Kartu Keluarga Sejahtera	43
5.2 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	44
5.3 Program Indonesia Pintar (PIP)	46
5.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR)	47
BAB VI DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020-2022 (Rp/Kapita/Bulan)	11
Tabel 2.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, 2021–2021	14
Tabel 2.3	<i>Head Count Index</i> Menurut Jenis Kelamin Dan Umur Penduduk Kota Yogyakarta, 2021 - 2022	17
Tabel 2.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Status Kemiskinan, 2021 – 2022	19
Tabel 4.1	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin, Maret 2022	29
Tabel 4.2	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2022	34
Tabel 4.3	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2022	38
Tabel 4.4	Persentase Rumah Tangga Miski, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Luas Lantai per Kapita (m ²), 2022	36
Tabel 4.5	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Jenis Atap Terluas, 2022 ...	37
Tabel 4.6	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Jenis Dinding Terluas, 2022	38
Tabel 4.7	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> dan Sumber Air Minum Rumah Tangga, 2022	38
Tabel 4.8	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Jenis Jamban Rumah Tangga, 2022	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Garis Kemiskinan Kota Yogyakarta dan Provinsi D.I. Yogyakarta, 2012-2022 (Rp/Kapita/Bulan)	10
Gambar 2.2	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Yogyakarta, 2012-2022	12
Gambar 2.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Kota Yogyakarta dan Provinsi D.I. Yogyakarta, 2012-2022	17
Gambar 2.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kota Yogyakarta dan Provinsi D.I. Yogyakarta, 2012-2022	18
Gambar 3.1	Gini Ratio Kota Yogyakarta, Maret 2018-Maret 2022	24
Gambar 3.2	Indeks Theil dan Indeks L Kota Yogyakarta, Maret 2021 – Maret 2022	25
Gambar 3.3	Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah Menurut Kriteria Bank Dunia, Maret 2021 – Maret 2022	26
Gambar 4.1	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin Berumur 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta, Maret 2022	31
Gambar 4.2	Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin Menurut Pendidikan Kepala Rumah Tangga di Kota Yogyakarta, Maret 2022	32
Gambar 5.1	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan, 2022	44
Gambar 5.2	Persentase Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan per Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan di Kota Yogyakarta, 2022	46
Gambar 5.3	Persentase Rumah Tangga yang Menerima KUR per Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan di Kota Yogyakarta, 2022	48

BAB I

PENDAHULUAN

Mencakup Latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup dan data yang digunakan serta penulisan yang digunakan dalam publikasi ini

"Dalam RPJM 2020-2024 strategi pengurangan tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. "



<https://jogjakota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“End poverty in all its forms everywhere” (Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun)

Kemiskinan masih menjadi masalah serius hampir di setiap negara termasuk Indonesia. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan “utama” dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, yang kemudian akan mendasari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi, dan lain-lain.

Dalam RPJM 2020-2024 strategi pengurangan tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui, dalam RPJM 2020-2024 ditetapkan sasaran makro pembangunan yaitu penurunan tingkat kemiskinan antara 6-7 persen pada akhir tahun 2024.

Data Kemiskinan untuk Pembangunan

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia turut berkomitmen mengatasi berbagai persoalan yang ada demi tercapai SDGs, terutama masalah kemiskinan yang menjadi prioritas utama. Salah satu hal yang dilakukan adalah terus memperbaiki kualitas data kemiskinan yang ada. Tersedianya data kemiskinan yang akurat

diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, dan pada akhirnya mampu mewujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Sejak saat itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat **nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan.**

Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya, **sejak tahun 2002 BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota.**

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan untuk memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Apalagi untuk ekonomi Indonesia yang mengalami guncangan akibat pandemi covid-19, yang tentu berdampak pada kesejahteraan penduduk baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Haughton & Khandker (2009), ada empat alasan mengukur kemiskinan yaitu:

1. Merupakan instrumen yang kuat untuk memfokuskan pembuatkebijakan pada kehidupan orang miskin.
2. Mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat.
3. Memantau dan mengevaluasi proyek dan kebijakan yang digunakan untuk orang miskin.
4. Mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan publikasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Yogyakarta tahun 2022.
2. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui gambaran umum berbagai macam program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta pada kondisi Maret 2022. Publikasi ini juga menyajikan karakteristik rumah tangga miskin serta beberapa indikator kemiskinan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari publikasi ini adalah sebagai berikut:

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

Bab III membahas tentang ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta yang dijelaskan melalui gini ratio dan ketimpangan menurut kriteria bank dunia.

Bab IV membahas tentang profil rumah tangga miskin di Kota Yogyakarta dari sisi demografi, Pendidikan, ketenagakerjaan, dan tempat tinggal (perumahan).

Bab V menjelaskan beberapa program penanggulangan kemiskinan, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Bantuan Langsung Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintas (PIP), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, pada bagian lampiran juga disajikan tabel pendukung dan catatan teknis terkait metode penghitungan kemiskinan dan ketimpangan.

BAB II

ANGKA KEMISKINAN



Presentase Penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar **6,62 persen**, turun sebesar **-1.07 persen** poin dibanding Maret 2021

Garis Kemiskinan

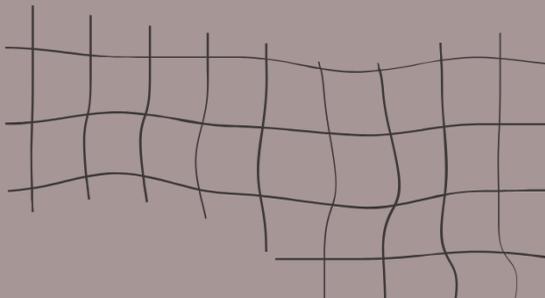
601.905 Rupiah

Naik sebesar **45.231** Rupiah dibanding 2021



Penduduk Miskin

- Jumlah penduduk miskin mencapai **29,68** Ribu jiwa
- indeks Kedalaman kemiskinan **0,80** (P1)
- Indeks Keparahan Kemiskinan **0,13** (P2)



BAB II

KONDISI KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA

2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2012-2022

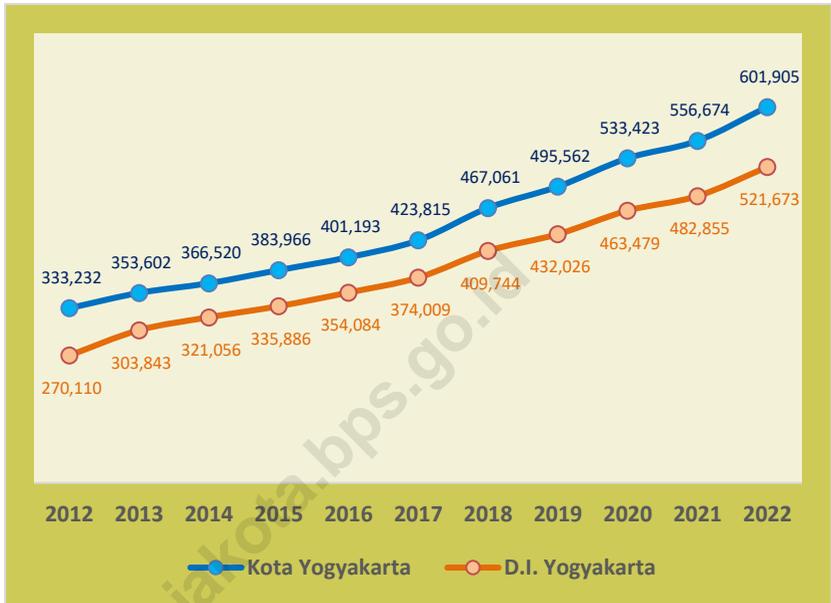
Garis Kemiskinan Kota Yogyakarta Terus Mengalami Peningkatan

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada gambar 2.1 menunjukkan tren garis kemiskinan Kota Yogyakarta dan Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2012–2022 memiliki pola yang sama, yaitu menunjukkan peningkatan terus menerus dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2012 garis kemiskinan Kota Yogyakarta hanya sebesar Rp.333.232 perkapita perbulan, namun pada tahun 2022 sudah mencapai 2 kali lipat sebesar Rp. 601.905 perkapita perbulan. Untuk Provinsi D.I. Yogyakarta dalam periode 2012–2022 juga meningkat sekitar 2 kali lipat dari sebesar Rp. 270.110 perkapita perbulan pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 521.673 perkapita perbulan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan garis kemiskinan Kota Yogyakarta sejalan dengan pertumbuhan garis kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Gambar 2.1 Garis Kemiskinan Kota Yogyakarta dan Provinsi D.I. Yogyakarta, 2012-2022 (Rp/Kapita/Bulan)



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2022

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa besarnya garis kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar Rp. 601.905,00. Nilai ini menggambarkan besarnya pengeluaran perkapita minimum yang harus dibelanjakan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup makanan dan bukan makanan. Penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki daya beli kurang dari Rp. 601.905,00 sebulan termasuk sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Kota Yogyakarta yang Tertinggi

Menurut kabupaten/kota, Kota Yogyakarta merupakan wilayah kabupaten/kota yang mempunyai garis kemiskinan tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu sebesar Rp 601.905 per kapita per bulan pada tahun 2022. Dalam periode 2020–2022, struktur ini

tetap bertahan dengan komposisi dari yang tertinggi.

Tabel 2.1 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020-2022 (Rp/Kapita/Bulan)

Kabupaten/kota	Garis Kemiskinan		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	353.807	360.202	381.666
Bantul	405.613	418.265	445.511
Gunungkidul	319.851	325.907	350.739
Sleman	411.610	422.933	450.763
Kota Yogyakarta	533.423	556.674	601.905

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2022 Turun Dibanding Tahun 2021

Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin digambarkan oleh indikator *Head Count Index* (P_0). Indikator ini merefleksikan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan.

Secara umum, tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012, persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta besarnya 9,38 persen dan terus menurun menjadi 6,84 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dititik paling rendah, namun pada tahun 2020-2021 persentase penduduk miskinnya meningkat kembali seiring dengan adanya Covid-19. Setelah masa pandemic covid-19 mereda, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,62 persen pada tahun 2022.

Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Yogyakarta, 2012 – 2022.



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2022

Salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan pada tahun 2020 adalah adanya penurunan pendapatan rumah tangga sebagai salah satu dampak adanya Covid-19. Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada tahun 2020-2021, berdasarkan data Sakernas Agustus, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta sebesar 9,16 persen pada tahun 2020, dan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 9,13 persen. Setelah masa pandemic covid19 berakhir, ekonomi mulai pulih dan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di tahun 2022.

Perkembangan jumlah penduduk miskin sejalan dengan persentase penduduk miskin. Sebelum tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta di atas 32 ribu jiwa. Sementara itu, semenjak tahun 2018-2019, angka kemiskinan berkisar pada angka 29 ribu jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta

sebesar 34 ribu jiwa, dan menurun lagi menjadi 29,68 ribu jiwa pada tahun 2022.

Pola perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta secara umum terus menurun. Pada periode tahun 2012-2019, penurunan tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta terjadi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, kemudian pada tahun 2020-2021 meningkat dikarenakan Covid-19. Dan pada tahun 2022 kembali turun dikarenakan perekonomian masyarakat pasca pandemic sudah mulai bangkit kembali.

Peningkatan garis kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2022 selalu menjadi yang tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar 29,68 ribu orang (6,62 persen), mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 34,07 ribu orang (7,69 persen). Selama periode waktu 2020–2021, penduduk miskin di Kota Yogyakarta menurun sebanyak 4,39 ribu orang, sementara persentasenya menurun 1,07 persen (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021–2022

Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk miskin (ribuan jiwa)	Persentase penduduk miskin (P_0)	Perubahan jumlah penduduk miskin (ribuan)	Perubahan persentase penduduk miskin
Tahun			(2021–2022)	(2021–2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulon Progo				
2021	81,14	18,38	-7,93	-1,99
2022	73,21	16,39		
Bantul				
2021	146,98	14,04	-16,85	-1,77
2022	130,13	12,27		
Gunungkidul				
2021	135,33	17,69	-12,51	-1,83
2022	122,82	15,86		
Sleman				
2021	108,93	8,64	-10,01	-0,90
2022	98,92	7,74		
Kota Yogyakarta				
2021	34,07	7,69	-4,39	-1,07
2022	29,68	6,62		

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022

Penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Pemulihan

ekonomi pasca pandemic covid-19 berdampak pada terbukanya kembali lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Aktivitas sosial ekonomi bergerak lebih cepat pada pasca pandemic, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat. Pendapatan yang meningkat tentu akan menurunkan angka kemiskinan

Persentase penduduk miskin digambarkan oleh indikator *Head Count Index* (P_0). Indikator ini merefleksikan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, nilai *Head Count Index* penduduk laki-laki pada Maret 2022 sebesar 6,07 persen (lihat Tabel 2.3). artinya, terdapat 6,07 persen dari seluruh penduduk laki-laki yang berstatus miskin. Nilai ini mengalami penurunan sebanyak 2,02 persen poin dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 8,09 persen. Penurunan *Head Count Index* juga terjadi pada kelompok penduduk Perempuan, turun sebanyak 0,32 persen poin.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, nilai *Head Count Index* untuk penduduk yang berusia <18 tahun pada Maret 2022 sebesar 10,45 persen dan mengalami penurunan 2,56 persen poin dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 13,01 persen. Penurunan *Head Count Index* juga terjadi pada kelompok penduduk yang berusia ≥ 18 tahun.

Tabel 2.3 Head Count Index Menurut Jenis Kelamin Dan Umur Penduduk Kota Yogyakarta, 2021- 2022

Kategori		HCI	
		Maret 2021	Maret 2022
Jenis Kelamin	Laki-laki	8,09	6,07
	Perempuan	7,46	7,14
Umur	Umur < 18 tahun	13,01	10,45
	umur >= 18 tahun	6,21	5,43

Sumber: BPS, Data Diolah dari Susenas Maret 2021 - Maret 2022

2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), 2012-2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Berfluktuasi Antar Periode

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) merupakan dimensi penting lain dalam analisis kemiskinan. Indeks ini merupakan pelengkap indikator jumlah dan persentase penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 merupakan angka terendah sepanjang masa. Angka itu hanya pada kisaran 0,80, sangat jauh jika dibandingkan dengan angka provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 2,01. Dengan angka yang sangat rendah tersebut berarti ketimpangan pengeluaran Masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Hal ini membawa harapan bagi penduduk miskin untuk dapat mengejar standar kehidupan minimum semakin mudah dijangkau.

Gambar 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Kota Yogyakarta dan Provinsi D.I. Yogyakarta, 2012- 2022



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2022

2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), 2012-2022

Pada Periode Maret 2021-Maret 2022, Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Turun Sebesar 0,08 Poin

Selain indeks kedalaman kemiskinan, indikator lain terkait kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2). Indeks ini menjelaskan mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan juga menunjukkan pergerakan yang cenderung lambat.

Di Kota Yogyakarta, dari tahun 2012 hingga tahun 2022, indeks keparahan kemiskinan menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada beberapa periode, nilai P_2 naik, dan pada periode lainnya mengalami penurunan. Namun demikian, secara umum nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan pola cenderung menurun.

Nilai indeks keparahan kemiskinan mencapai titik terendah pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,13. Pada tahun 2017, indeks keparahan kemiskinan mencapai titik tertinggi hingga sebesar 0,48. Pada satu tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan sebanyak 0,28 poin yaitu dari 0,20 (tahun 2019) meningkat lagi menjadi 0,28 (tahun 2020) dan akhirnya turun ke titik terendah di tahun 2022. Hal ini dapat dimaknai bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 semakin rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan nilai indeks keparahan kemiskinan Provinsi D.I. Yogyakarta yang kondisinya juga turun sebesar 0,51 tahun 2022.

Gambar 2.4 Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) di Kota Yogyakarta dan Provinsi D.I. Yogyakarta, 2012 - 2022



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2022

2.4 Tingkat Kemiskinan dan Persentase Total Pengeluaran Menurut Status Kemiskinan, 2022

Persentase Penduduk menurut Status Kemiskinan Sebagian Besar adalah Tergolong Rentan Miskin Lainnya.

Selain dari segi jumlah dan persentase penduduk miskin, perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan, yang tercermin pada besaran dan pola pengeluaran penduduk.

Pada tahun 2021, untuk kelompok penduduk sangat miskin sebanyak 5.121 (1,16 persen), sedangkan yang miskin sebanyak 29.278 (6,61 persen). Sedangkan rentan miskin lainnya dan hampir miskin lebih besar jumlahnya yaitu 34.615 (7,82 persen) dan 30.955 (6,99 persen).

Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Status Kemiskinan, 2021-2022

Status Miskin	Jumlah Penduduk		Persentase	
	2021	2022	2021	2022
TM	342.937	347.423	77,43	77,47
RML	34.615	42.960	7,82	9,58
HM	30.955	28.419	6,99	6,34
M	29.278	24.795	6,61	5,53
SM	5.121	4.887	1,16	1,09

Sumber: BPS, Data Diolah dari Susenas Maret 2021-Maret 2022

Keterangan:

SM : Sangat Miskin (pengeluaran perkapita/bulan < 0,8GK)

M : Miskin (0,8GK <= pengeluaran perkapita/bulan < GK)

HM : Hampir Miskin (GK <= pengeluaran perkapita/bulan < 1,2GK) RML : Rentan Miskin Lainnya (1,2GK <= pengeluaran perkapita/bulan < 1,6GK)

TM : Tidak Miskin (pengeluaran perkapita/bulan >= 1,6GK)

BAB III

KETIMPANGAN PENGELUARAN



Salah satu ukuran untuk mengukur ketimpangan adalah *Gini Ratio*. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi juga ketimpangan yang terjadi.

Gini Ratio Kota Yogyakarta

Tahun 2022 sebesar 0,519



BAB III

KETIMPANGAN PENGELUARAN DI KOTA YOGYAKARTA

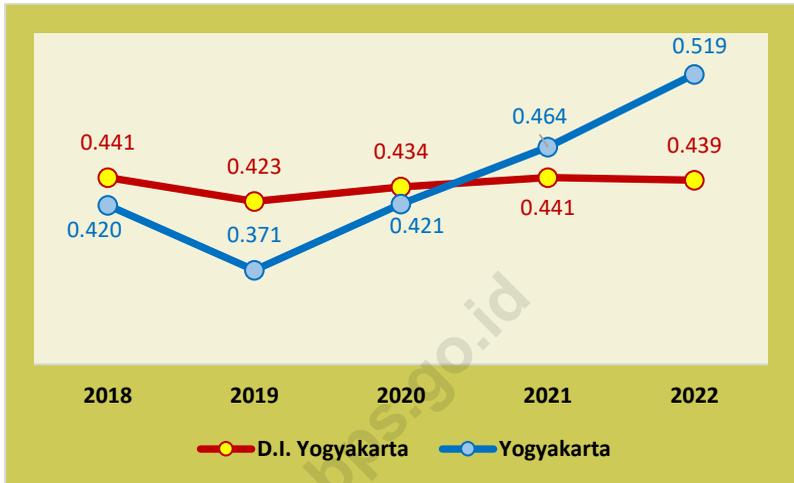
Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan adalah koefisien Gini (*Gini Ratio*), Indeks Theil, Indeks-L, dan Ukuran Bank Dunia

3.1 Gini Ratio

Selama Periode Maret 2021 - Maret 2022, Angka Gini Ratio naik sebesar 0,06 poin

Gini Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Pada periode Maret 2021 dan Maret 2022, Gini Ratio Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 0,464 menjadi 0,519 (Gambar 3.1).

Gambar 3.1 Gini Ratio Kota Yogyakarta, Maret 2018-Maret 2022



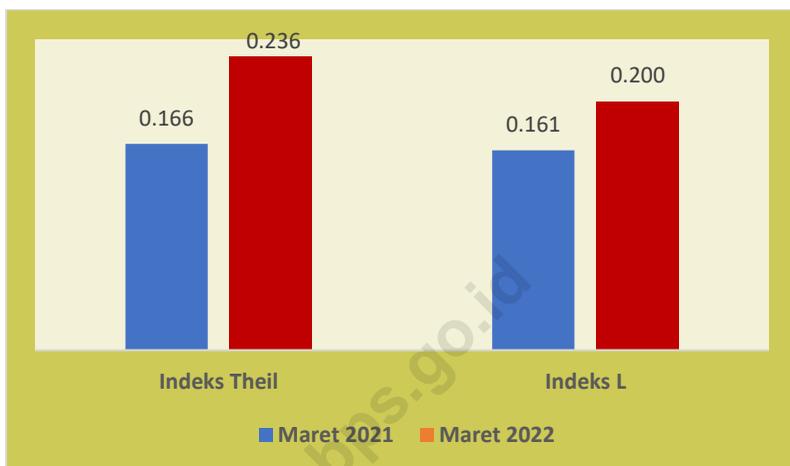
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

3.2 Indeks Theil dan Indeks L

Selain Gini Ratio dikenal juga Indeks Theil yang dapat menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Indeks ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran pada penduduk kelompok atas (kaya). Selama setahun terakhir (Maret 2021 – Maret 2022), Indeks Theil naik dari 0,166 menjadi 0,236 (Gambar 3.2).

Indikator ketimpangan pengeluaran lainnya adalah Indeks-L. Indeks ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok bawah. Selama setahun terakhir (kondisi Maret 2021 – Maret 2022), Indeks-L naik dari 0,161 menjadi 0,200 (Gambar 3.2).

Gambar 3.2 Indeks Theil dan Indeks L Kota Yogyakarta, Maret 2021 – Maret 2022



Sumber: BPS, Diolah dari Susenas Maret 2021 dan Maret 2022

3.3 Kriteria Bank Dunia

Indikator lain untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari kelompok pengeluaran ini terhadap seluruh pengeluaran penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran sebagai berikut:

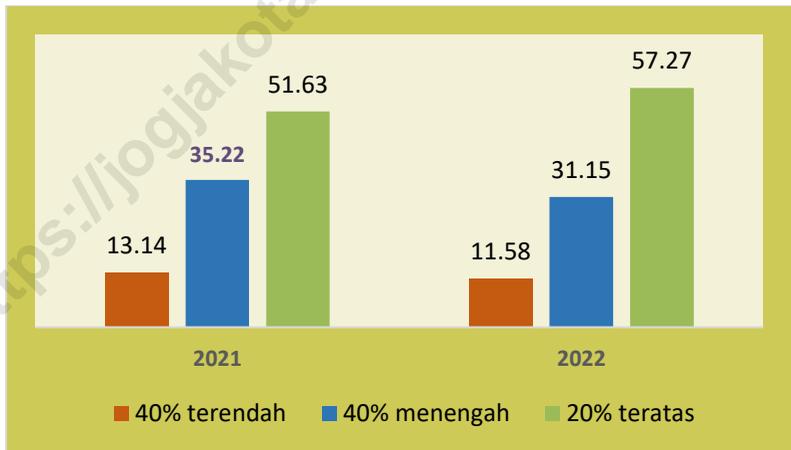
- a. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*highly inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen,

- b. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen, dan
- c. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah di atas 17 persen.

Pada Maret 2022, Tingkat Ketimpangan Berada pada Level Tinggi

Secara keseluruhan, pada tahun 2022 ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia tergolong ketimpangan tinggi (*highly inequality*) (Gambar 3.5).

Gambar 3.3 Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah Menurut Kriteria Bank Dunia, Maret 2021 – Maret 2022



Sumber: BPS, diolah dari Susenas Maret 2021-Maret 2022

BAB IV

PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA



20.08%
TIDAK TAMAT SD



59.71%
**TIDAK
BEKERJA**



98.67 %
**ANGKA MELEK
HURUF umur 15
Tahun Keatas**



25,83 %
**PENGUNAAN AIR
LAYAK**



BAB IV PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA

4.1 Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan pada profil rumah tangga miskin meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (dilihat dari indikator rata-rata lamanya bersekolah kepala rumah tangga dan Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga). Keempat karakteristik tersebut dibandingkan dengan melihat proporsi rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin dan tidak miskin (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin Dan Rumah Tangga Tidak Miskin, Maret 2022

Karakteristik Rumah Tangga	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Tidak Miskin
Rata-rata Jumlah ART (orang)	4,62	2,83
Persentase KRT Wanita	8,68	28,44
Rata-rata Usia KRT (tahun)	47,07	45,10
Rata-rata Lama Sekolah KRT (tahun)	8,32	11,98

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Maret 2022

Pada rumah tangga miskin rata-rata anggota rumah tangganya lebih banyak dibanding rumah tangga tidak miskin. Pada tahun 2022 rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 4-5 anggota rumah

tangga, sedangkan rata-rata anggota rumah tangga tidak miskin dari berkisar antara 2-3 anggota rumah tangga.

Perempuan sebagai kepala rumah tangga bermakna perempuan memikul tanggung jawab tunggal untuk menghidupi keluarganya. Seringkali mereka adalah pencari nafkah utama dan harus memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya. Perempuan sebagai kepala rumah tangga pada tahun 2022 pada rumah tangga miskin sebesar 8,68 persen, sedangkan perempuan sebagai kepala rumah tangga pada keluarga tidak miskin jauh lebih besar dibandingkan pada keluarga miskin yaitu sebesar 28,44 persen.

Sementara itu dilihat dari distribusi umur kepala rumah tangga, rata-rata umur kepala rumah tangga miskin pada tahun 2022 sebesar 47,07 tahun, lebih tua dibandingkan rata-rata umur kepala rumah tangga pada keluarga tidak miskin sebesar 45,10 tahun.

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin lebih rendah dari tingkat pendidikan kepala rumah tangga tidak miskin. Hal ini tercermin salah satunya dari indikator rata-rata lama sekolah. Pada rumah tangga miskin rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga pada tahun 2022 adalah 8,32 tahun. Jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin hal ini menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi dimana pada rumah tangga tidak miskin di tahun 2022 rata-rata lama sekolah adalah 11,98 tahun.

4.2 Karakteristik Pendidikan

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah,

dengan kata lain dapat menggambarkan sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar atau program keaksaraan yang efektif. AMH latin penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar 98,67 persen (Gambar 4.1). sedangkan AMH latin penduduk tidak miskin berumur 15 tahun ke atas sebesar 99,29 persen.

Kesenjangan akses dalam pendidikan terlihat dari kemampuan membaca dan menulis pada kelompok miskin. Belum semua penduduk miskin di Kota Yogyakarta terbebas dari buta huruf. Pembangunan Pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh rakyat miskin.

Gambar 4.1 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kota Yogyakarta, Maret 2022



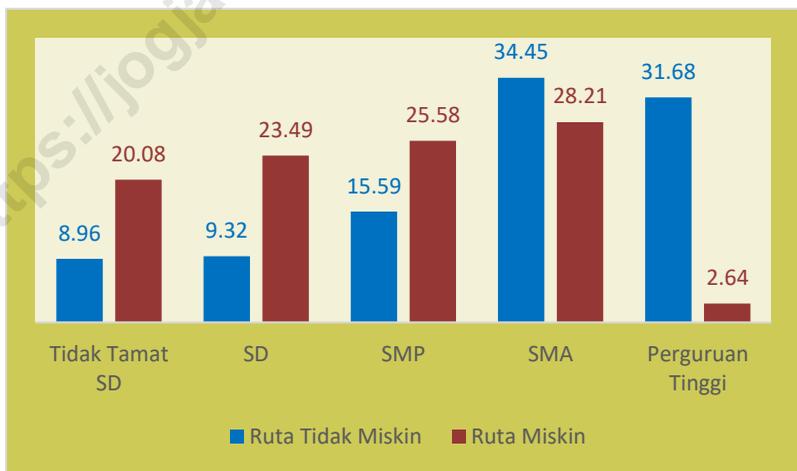
Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Maret 2022

Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin Lebih Rendah Dibandingkan Rumah Tangga Tidak Miskin

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan rendah (Tidak Tamat SD dan SD/ sederajat) lebih tinggi dibanding rumah tangga tidak miskin (Gambar 4.2). Hal ini sejalan dengan yang disajikan pada Gambar 4.2 bahwa kepala rumah tangga miskin memiliki pendidikan lebih rendah dari pada kepala rumah tangga tidak miskin.

Dilihat dari pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, pada rumah tangga miskin lebih rendah disetiap jenjang Pendidikan dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak miskin.

Gambar 4.2 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin menurut Pendidikan Kepala Rumah Tangga di Kota Yogyakarta, Maret 2022.



Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Maret 2022

4.3 Karakteristik Ketenagakerjaan

Selain ketidakberdayaan dalam akses pengetahuan dan keterampilan, kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakberdayaan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang dengan imbalan yang kurang memadai atau tidak pasti keberlanjutannya (<http://hukum.unsrat.ac.id/>). Bahkan, kondisi tersebut bisa memberikan peluang bagi seseorang menjadi pengangguran.

Pada Umumnya Rumah Tangga Miskin Menggantungkan Hidupnya dari Sektor Jasa

Sumber penghasilan utama menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan. Secara umum, rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor Lainnya yaitu jasa (35,75 persen) dan manufaktur (3,98 persen). Sementara itu, untuk rumah tangga tidak miskin pada umumnya juga berpenghasilan utama dari sektor lainnya (42,69 persen) dan manufaktur (7,32 persen) (Tabel 4.5).

Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2022

Sumber Penghasilan Utama	Ruta Miskin	Ruta Tidak Miskin	Head count index
Tidak Bekerja	59,71	48,74	13,96
Pertanian	0,56	1,25	5,62
Manufaktur	3,98	7,32	6,72
Lainnya	35,75	42,69	9,98

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Maret 2022

Nilai *Head Count Index* tertinggi berturut-turut rumah tangganya di sektor lainnya (9,98 persen), rumah tangga yang sumber penghasilan utama kepala rumah tangganya di sektor manufaktur (6,72 persen), rumah tangga yang tidak bekerja (13,96 persen).

Pada Umumnya Kepala Rumah Tangga Miskin Berstatus Sebagai Pekerja Formal

Menurut sektornya, pekerja dibagi menjadi dua yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah pekerja yang mempunyai status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai. Kepala rumah tangga miskin sebagian besar berstatus sebagai pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 18,82 persen. Sementara itu, kepala rumah tangga miskin berstatus sebagai pekerja yang berstatus berusaha sendiri sebesar 15,31 persen. Pada tabel 4.3 juga terlihat nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang kepala rumah tangga berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas lebih tinggi dibandingkan rumah tangga lainnya yaitu sebesar 14,78 persen dan 13,11 persen. Kemudian

diikuti dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya berstatus berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 7,55 persen.

Tabel 4.3 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2022

Status Pekerjaan	Ruta Miskin	Ruta Tidak Miskin	<i>Head count index</i>
Tidak Bekerja	60,14	49,43	13,88
1	15,31	11,69	14,78
2&6	4,04	6,88	7,22
3&4	18,82	30,51	7,55
5	1,69	1,48	13,11

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Maret 2021

Keterangan:

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas
6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar

4.4 Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

Indikator perumahan dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga antara lain luas dan jenis lantai, atap, dinding, penerangan, sumber air, jamban, dan status kepemilikan rumah tempat tinggal.

4.4.1 Luas Lantai

Keleluasaan pribadi (*privacy*) dalam tempat tinggal menjadi salah satu indikator perumahan yang menggambarkan tingkat

kesejahteraan suatu rumah tangga. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah perkapita (m²). Menurut Kementerian Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapitanya minimal 8m² (BPS, 2001). Tabel 4.4 menunjukkan bahwa masih cukup banyak rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita $\leq 8\text{m}^2$ yaitu sebesar 62,24 persen. Sementara persentase rumah tangga tidak miskin yang menempati luas lantai per kapita $\leq 8\text{m}^2$ hanya sebesar 14,55 persen. Nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang luas lantai per kapita $\leq 8\text{m}^2$ tercatat sebesar 17,94 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang mempunyai luas lantai $> 8\text{m}^2$.

Tabel 4.4 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Luas Lantai per Kapita (m²), 2022

Luas Lantai	Ruta Miskin	Ruta Tidak Miskin	Head count index
≤ 8	62,24	14,55	17,94
$8 < \text{luas} \leq 15$	20,27	22,51	4,40
> 15	17,49	62,94	1,40

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Maret 2022

4.4.2 Jenis Atap

Head Count Index Tertinggi Terdapat pada Rumah Tangga dengan Jenis Atap bukan genteng. Baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin, sudah banyak yang menggunakan atap jenis beton/genteng/sirap maupun seng/asbes. Nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga dengan jenis atap beton/genteng/sirap dan seng/asbes hanya sebesar 3,91 persen. Nilai *Head Count Index* tertinggi terdapat pada rumah tangga dengan jenis atap bukan genteng yakni sebesar 10,62 persen. Artinya, rumah tangga miskin

lebih banyak dijumpai pada rumah tangga yang jenis atapnya bukan genteng.

Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Jenis Atap Terluas, 2022

Jenis Atap	Ruta Miskin	Ruta Tidak Miskin	Head count index
Genteng	69,06	86,69	3,91
Bukan genteng	30,94	13,31	10,62

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Maret 2022

4.4.3 Jenis Dinding

Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Jenis Dinding Tembok Lebih Rendah Dibanding Rumah Tangga Tidak Miskin

Berdasarkan jenis dinding rumahnya, terdapat perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin. Persentase rumah tangga tidak miskin dengan jenis dinding tembok lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin, yaitu 93,23 persen dibanding 75,96 persen. Sedangkan penggunaan jenis dinding kayu, bambu, dan lainnya terlihat lebih tinggi pada rumah tangga miskin dibanding rumah tangga tidak miskin (Tabel 4.6). Nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang jenis dinding terluasnya kayu dan dinding lainnya lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang jenis dinding terluasnya tembok.

Tabel 4.6 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Jenis Dinding Terluas, 2022

Jenis Dinding	Ruta Miskin	Ruta Tidak Miskin	<i>Head count index</i>
Tembok	75,96	93,23	4,00
Kayu	12,42	2,33	21,42
Lainnya	11,62	4,44	11,80

Sumber: BPS, Diolah dari Susenas Maret 2022

4.4.4 Sumber Air

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menikmati Air Bersih Lebih Rendah Dibandingkan Rumah Tangga Tidak Miskin

Ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum merupakan indikator perumahan yang mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Ketidaktersediaan air bersih juga menjadi salah satu indikasi kemiskinan.

Tabel 4.7 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Sumber Air Minum Rumah Tangga, 2022

Sumber Air Minum Rumah Tangga	Ruta Miskin	Ruta Tidak Miskin	<i>Head count index</i>
Air Bersih	25,83	71,16	1,82
Lainnya	74,17	28,84	11,62

Sumber: BPS, Diolah dari Susenas Maret 2022

Persentase rumah tangga tidak miskin yang menikmati air bersih sebagai sumber air minum yaitu sebesar 71,16 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin yang hanya sebesar 25,83 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga miskin yang menikmati air lainnya sebagai sumber air minum yaitu sebesar 74,17 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga tidak miskin

yang sebesar 28,84 persen. Nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang tidak mengakses air bersih (11,62 persen) lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang mampu mengakses air bersih (1,82 persen). Artinya, hanya sebagian kecil rumah tangga miskin yang mempunyai kemampuan mengakses air bersih sebagai sumber air minumannya.

4.4.5 Jenis Jamban

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri Lebih Tinggi Dibandingkan Rumah Tangga Tidak Miskin Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal, dan jamban umum/tidak ada. Persentase rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri sebesar 75,96 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin yang sebesar 39,66 persen. Nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang mempunyai jamban sebesar 2,60 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang mempunyai jamban bersama/komunal yang sebesar 7,63 persen

Tabel 4.8 Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Jenis Jamban Rumah Tangga, 2022

Jenis Jamban Rumah Tangga	Ruta Miskin	Ruta Tidak Miskin	<i>Head count index</i>
Jamban Sendiri	39,66	75,96	2,60
jamban bersama/komunal	30,69	18,98	7,63
jamban umum/tidak ada	29,65	5,06	23,05

Sumber: BPS, Diolah dari Susenas Maret 2022

BAB V

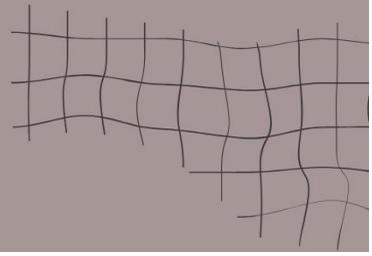
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bantuan sosial yang diberikan merupakan bagian dari Program Bantuan Tunai yang diluncurkan pemerintah yang mencakup tiga jenis program yaitu Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 Juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM.

**Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS)**

**Program Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT)**

**Kredit Usaha Rakyat
(KUR)**



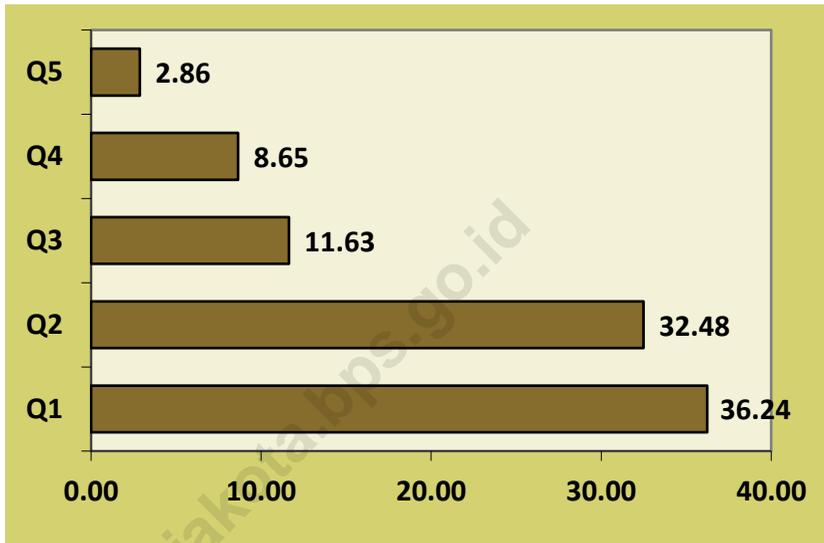
BAB V PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pandemi covid-19 di Indonesia belum berakhir. Pemerintah terus berupaya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Penyaluran diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah padan dengan Data Kementerian Dalam Negeri. Bantuan sosial yang diberikan merupakan bagian dari Program Bantuan Tunai yang diluncurkan pemerintah yang mencakup tiga jenis program yaitu Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 Juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM.

5.1 Kartu Keluarga Sejahtera

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS berfungsi sebagai media penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Kartu ini juga dapat merekam data penerima dan tabungan elektronik (e-wallet). Kartu KKS juga sudah digunakan oleh sebagian penerima PKH untuk memanfaatkan bantuan melalui ATM atau Agen Bank ditunjuk dan penerima Bantuan Pangan untuk mengambil bantuannya di e-warong. Semakin Tinggi Kelompok Quintil Pengeluaran Semakin Rendah Persentase Rumah Tangga Penerima KKS.

Gambar 5.1 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan, 2022



Sumber: BPS, Data Diolah dari Susenas Maret 2022

Berdasarkan distribusi rumah tangga penerima KKS, semakin tinggi kelompok quintil pengeluaran semakin rendah persentase rumah tangga penerima KKS (Gambar 5.1). Rumah tangga pada kelompok 20 persen terbawah (Q1) memiliki persentase yang paling tinggi sebagai penerima KKS yaitu sebesar 36,24 persen. Sementara itu, pada rumah tangga kelompok 20 persen teratas (Q5) masih terdapat 2,86 persen rumah tangga yang menerima program.

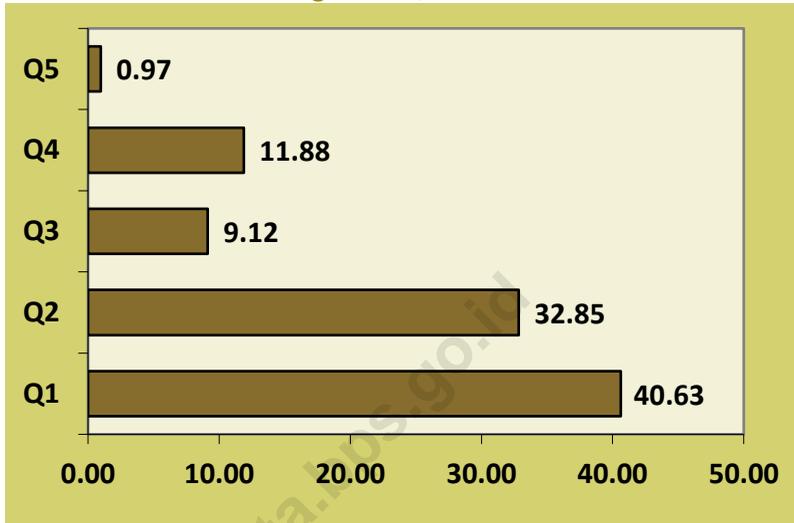
5.2 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sejak tahun 2017 penyaluran beras bersubsidi mulai dialihkan pemerintah melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan bantuan sosial pangan senilai Rp110.000,-.

Namun mulai tahun 2020, program BPNT mengalami perubahan nilai menjadi Rp150.000,- yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik. Saat ini, uang elektronik tersebut dapat digunakan untuk membeli beras dan bahan pangan lainnya seperti telur, ayam, lele, buah sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-warong.

Pada tahun 2022, program bantuan ini masih diberikan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp200.000,- per bulan. Besaran bantuan yang diterima mengalami kenaikan dari sebelumnya yang hanya berkisar Rp. 150.000,-. Pada Gambar 5.2 menyajikan rumah tangga penerima BPNT pada tahun 2022. Terlihat bahwa semakin tinggi pengeluaran semakin rendah persentase rumah tangga penerima BPNT. Hal ini berarti persebaran rumah tangga penerima BPNT didominasi oleh kelompok pendapatan terbawah (Q1) dengan persentase quintilnya lebih dari 40 persen. Sementara itu, penerima BPNT masih ditemukan pada beberapa rumah tangga di quintil pengeluaran kelompok atas (Q4) dengan persentasenya lebih dari 10 persen

Gambar 5.2 Persentase Rumah Tangga Penerima BPNT Menurut Quintil Pengeluaran, 2022



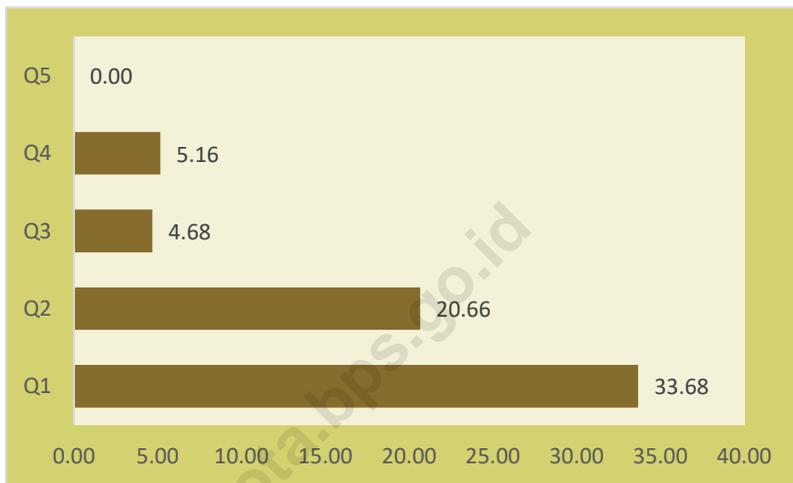
Sumber: BPS, Data Diolah dari Susenas Maret 2022

5.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

Semakin Tinggi Kelompok Quintil Pengeluaran Semakin Rendah Persentase Rumah Tangga Penerima PKH

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program PKH telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Gambar 5.2 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan Per Quintil Pengeluaran per Kapita/Bulan di Kota Yogyakarta, 2022



Sumber: BPS, Data Diolah dari Susenas Maret 2022

Gambar 5.2 menyajikan rumah tangga penerima PKH menurut quintil. Dari gambar tersebut, pada kelompok 20 persen terbawah (Q1), sebanyak 33,68 persen rumah tangga menerima PKH. Kelompok ini juga merupakan kelompok dengan persentase penerima PKH paling banyak. Sementara itu, pada kelompok 20 persen teratas sudah tidak terdapat rumah tangga penerima PKH.

5.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penerima KUR Lebih Banyak Diterima pada Kelompok Quintil Atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbeda dengan program penanggulangan kemiskinan yang lain. Sebagai program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, target penerima KUR adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada

skala mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Oleh karena itu, wajar jika KUR hampir secara merata diterima pada semua kelompok quintil.

Gambar 5.3 Persentase Rumah Tangga yang Menerima KUR per Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan di Kota Yogyakarta, 2022



Sumber: BPS, Data Diolah dari Susenas Maret 2022

Gambar 5.3 menjelaskan bahwa yang paling banyak menerima KUR adalah kelompok 20 persen Ketiga (Q3) dan kelompok 20 persen teratas (Q1). Kelompok Q2 sebanyak 7,41 persen diikuti Q5 sebanyak 3,79 persen. Sedangkan penerima KUR paling rendah adalah kelompok Q4 yang hanya sebesar 3,69 persen.

DAFTAR PUSTAKA

<https://jogjakota.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS), 2003, Metodologi dan Profil Kemiskinan Tahun 2002, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute. 2002. Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan. Jakarta : Badan Pusat Statistik

_____, 2007-2016, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

_____, 2000a, Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999 : Metode BPS. Seri Publikasi Susenas Mini 1999-Buku 1, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

_____, 2000b, Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya 1996-1999: Sebuah Kajian Sederhana Seri Publikasi Sosial Mini 1999-Buku 2, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

_____, 2000c, Penyempurnaan Metodologi Penghitungan Penduduk Miskin dan Profil Kemiskinan 1999, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

_____, 2000d, Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin : Metodologi Penentuan Rumah Tangga Miskin 2000, Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2021. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2021. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

_____. 2021. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2022. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan

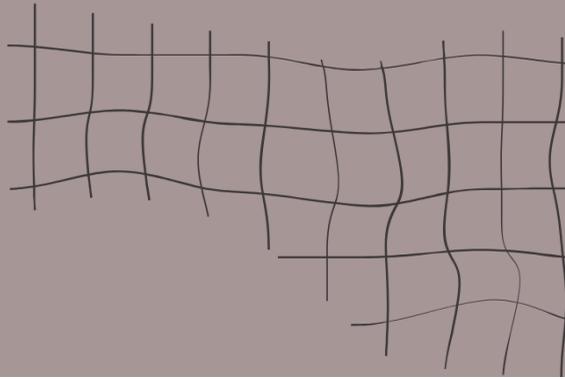
Makro Indonesia 2022. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

_____. 2022. Data dan Informasi Kemiskinan
Kabupaten/Kota Tahun 2021. Jakarta : Badan Pusat Statistik

<https://jogjakota.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://jogjakota.go.id>



LAMPIRAN 1

Tabel 1. Garis Kemiskinan Kota Yogyakarta dan D.I. Yogyakarta, 2012-2022 (Rp/Kapita/Bulan)

Daerah/Tahun	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
(1)	(2)	(3)
2012	333.232	270.110
2013	353.602	303.843
2014	366.520	321.056
2015	383.966	335.886
2016	401.193	354.084
2017	423.815	374.009
2018	467.061	409.744
2019	495.562	432.026
2020	533.423	463.479
2021	556.674	482.855
2022	601.905	521.673

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2022

LAMPIRAN 2

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Yogyakarta, 2012–2022

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2012	37,70	9,38
2013	35,60	8,82
2014	35,60	8,67
2015	35,98	8,75
2016	32,06	7,70
2017	32,20	7,64
2018	29,75	6,98
2019	29,45	6,84
2020	31,62	7,27
2021	34,07	7,69
2022	29,68	6,62

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2022

LAMPIRAN 3

Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Yogyakarta dan D.I. Yogyakarta, 2012–2022

Daerah/Tahun	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
(1)	(2)	(3)
2012	1,57	2,89
2013	1,24	2,13
2014	1,14	2,35
2015	1,06	2,93
2016	1,05	2,30
2017	1,58	2,19
2018	1,38	2,07
2019	0,85	1,74
2020	1,19	1,94
2021	1,07	2,42
2022	0,80	2,01

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2022

LAMPIRAN 4

Tabel 3. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Yogyakarta dan D.I. Yogyakarta, 2012–2022

Daerah/Tahun	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
(1)	(2)	(3)
2012	0,37	0,75
2013	0,27	0,46
2014	0,26	0,61
2015	0,23	0,83
2016	0,19	0,59
2017	0,48	0,55
2018	0,34	0,50
2019	0,20	0,38
2020	0,28	0,46
2021	0,21	0,65
2022	0,13	0,51

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2012-2022

LAMPIRAN 5

Tabel 4. Gini Ratio Kota Yogyakarta, Maret 2018-Maret 2022

Daerah/Tahun	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
(1)	(2)	(3)
2018	0,420	0,441
2019	0,371	0,423
2020	0,420	0,434
2021	0,460	0,441
2022	0,519	0,439

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2011-2022

LAMPIRAN 6

CATATAN TEKNIS

1. Literatur Kemiskinan

- Secara asal penyebab, kemiskinan terbagi menjadi 2 macam, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.
 1. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan.
 2. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".
- Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan

yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

- a. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.
- b. Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum.

Terminologi Kemiskinan Lainnya

- Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural:

Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto(1995:59) mendefinisikan“Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut mestinya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

- Soetandyo Wignjosebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosialbudayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat.

- Kemiskinan menurut World Bank (2000) didefinisikan sebagai, “*poverty is pronounced deprivation in well-being*” yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan.
- United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan.
- Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

1. Metode Penghitungan Kemiskinan

2.1 Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan

yang diukur dari sisi pengeluaran.

2.2 Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran dan Susenas KOR yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 dengan jumlah sampel 340.032 rumah tangga. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non-makanan. Untuk penimbang data Susenas (weight) yang merupakan *backcasting* dari penimbang proyeksi penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.

2.3 Metode

- Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) secara matematis:

$$GK = GKM + GKNM$$

- Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang

disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

- Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di pedesaan.

2.4 Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

- Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara. Garis kemiskinan sementara adalah Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi yang bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen. penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.
- GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk

referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah: :

$$GKM_{jp}^* = \sum_{k=1}^j P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^j V_{jkp}$$

GKM_{jp}^* : Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p

V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p

j : Daerah (perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke-p

- Selanjutnya untuk memperoleh GKM tersebut dilakukan penyetaraan harga 2100 kilokalori dengan cara mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sebagai berikut:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

K_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p

HK_{jp} : Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

GKM : Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi yang setara dengan 2100 kilokalori/ kapita/hari

j : Daerah (perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke-p

- $GKNM$ merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditikomoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/ sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPKKD 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_p = \sum_{k=1}^n r_{jk} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau

garis kemiskinan non- makanan daerah j dan provinsi p

V_{jkp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok nonmakanan daerah j dan provinsi p

r_{jk} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke-p

- Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \times 100\%$$

$\%PM_p$: % Penduduk miskin di provinsi p

PM_p : Jumlah penduduk miskin di provinsi p

P_p : Jumlah penduduk di provinsi p

- Penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

$$PM_1 = \sum_{p=1}^n PM_p$$

PM_1 : Jumlah penduduk miskin Indonesia

PM_p : Jumlah penduduk miskin di provinsi p

n : Jumlah provinsi

- Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PM_1 = \frac{PM_1}{P_1} \times 100\%$$

$\%PM_1$: Persentase penduduk miskin (secara nasional)

PM_1 : Jumlah penduduk miskin Indonesia

P_1 : Jumlah penduduk Indonesia

2.5 Indikator Kemiskinan

- Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:
 1. Pertama, Head Count Index (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
 2. Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
 3. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu

ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

α : 0, 1, 2

z : Garis kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

- Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2).

3. Distribusi dan Ketimpangan

- Pendapatan Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesisnya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b}$$

A : jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih

besar daripada X

N : jumlah penduduk total

b : parameter yang nilainya antara 1 dan 2

- Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai Pareto Law, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.
- Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan pendapatan yang bersumber dari data Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (Gini Ratio), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L.

3.1 Koefisien Gini (Gini Ratio)

- Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien Gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

G : Koefisien Gini (Gini Ratio)

X_k : Proporsi kumulatif dari penduduk untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$ dengan $X_0 = 0$ dan $X_n = 1$

Y_k : Proporsi kumulatif dari pengeluaran untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$ dengan $Y_0 = 0$ dan $Y_n = 1$

- Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.
- Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari kelompok termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan

pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

- Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:
 1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
 2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
 3. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
 4. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.
- Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

1. Dapat didekomposisi Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (sub-grup).
2. Dapat diuji secara statistik Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

3.2 Ukuran Bank Dunia

- Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah

lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.

2. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/ menengah.
3. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

3.3 Indeks Theil dan Indeks-L

- Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas). Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan “generalized entropy”. Rumus “generalized entropy” secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha - 1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right]$$

\bar{y} adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran)

- Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili

penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- GE (1) disebut sebagai indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

- GE (0), juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (mean log deviation) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y):

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA YOGYAKARTA**

